



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDRI BUDIARTA**
2. Jabatan : **LURAH**
3. NHK : **222456**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.080.000.000

1. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 316 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 1.947 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, Rp.
200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.418.452.917

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.396.959

F. HARTA LAINNYA Rp. 8.035.360

Sub Total Rp. 3.613.385.236

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.613.385.236

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.